



Upaya Mendorong Pemberdayaan UMKM Melalui Inklusi Keuangan Digital di Indonesia

Dian Prihatiningtyas

Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto

dian.staisam@gmail.com

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the Indonesian economy, contributing up to 60.90% of GDP and absorbing as much as 97% of the total workforce. However, MSMEs continue to face serious challenges, including limited access to capital, low financial planning capacity, and difficulties in managing transactions — a condition widely known as the financial inclusion gap. This study aims to examine how digital financial inclusion can drive the empowerment of MSMEs in Indonesia. The method employed is descriptive qualitative through a literature review drawn from various books, journals, articles, and online sources. The findings indicate that the advancement of digital technologies such as digital wallets (GoPay, OVO, DANA), fintech lending platforms, and integrated e-commerce platforms (Tokopedia, Shopee) has opened up easier, faster, and more affordable financial access for MSMEs. Government support through the "UMKM Go Digital" program has also successfully digitalized 25 million MSMEs by 2024. Nevertheless, challenges such as the digital literacy gap, uneven internet infrastructure, and cybersecurity threats still need to be addressed seriously. This study recommends a collaborative approach among the government, financial industry players, academics, and NGOs to ensure that the benefits of digital financial inclusion can be felt equitably across all levels of MSMEs, thereby fostering inclusive and globally competitive economic growth.

Keywords: MSMEs, digital financial inclusion, fintech, digital transformation, economic empowerment

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) **memegang** peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 60,90% dan menyerap hingga 97% tenaga kerja. Namun, UMKM masih menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan akses modal, rendahnya kapasitas perencanaan keuangan, dan kesulitan dalam pengelolaan transaksi — kondisi yang dikenal sebagai kesenjangan inklusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana inklusi keuangan digital dapat mendorong pemberdayaan UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dari berbagai buku, jurnal, artikel, dan sumber daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital seperti dompet digital (GoPay, OVO, DANA), platform *fintech lending*, dan e-commerce terintegrasi (Tokopedia, Shopee) membuka akses keuangan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi UMKM. Dukungan pemerintah melalui program "UMKM Go Digital" juga telah berhasil mendigitalisasi sebanyak 25 juta UMKM hingga tahun 2024. Meski demikian, tantangan seperti kesenjangan literasi digital, ketimpangan infrastruktur internet, serta ancaman keamanan siber masih perlu diatasi secara serius. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, industri keuangan, akademisi, dan LSM untuk memastikan manfaat inklusi keuangan digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing global.

Kata kunci: UMKM, inklusi keuangan digital, fintech, transformasi digital, pemberdayaan ekonomi

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di sebagian besar negara berkembang. Secara global, UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 70% tenaga kerja di negara-negara berpendapatan menengah ke bawah (World Bank, 2022). Di Indonesia, peran UMKM bahkan lebih strategis lagi: sektor ini menyumbang hingga 60,90% terhadap PDB nasional dan mampu menyerap sebanyak 97% dari total tenaga kerja yang ada (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Besarnya kontribusi ini menjadikan UMKM sebagai instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Dibalik kontribusi tersebut, UMKM di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural yang serius, terutama dalam hal akses terhadap layanan keuangan formal. Kondisi ini dikenal luas sebagai kesenjangan inklusi keuangan (*financial inclusion gap*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa meskipun indeks inklusi keuangan nasional pada tahun 2022 telah mencapai 85,10%, indeks literasi keuangan masyarakat hanya berada di angka 49,68%, mengindikasikan bahwa akses terhadap layanan keuangan belum diimbangi oleh pemahaman yang memadai (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Bagi pelaku UMKM, kesenjangan ini termanifestasi dalam keterbatasan akses modal dari perbankan formal, rendahnya kapasitas perencanaan keuangan, serta kesulitan mengelola transaksi secara efisien dan tercatat. Bank konvensional umumnya mensyaratkan agunan fisik, riwayat kredit formal, dan laporan keuangan terstandar, persyaratan yang sulit dipenuhi oleh mayoritas UMKM informal yang beroperasi di Indonesia.

Kemunculan teknologi keuangan digital membuka peluang baru untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Perkembangan ekosistem keuangan digital seperti dompet elektronik (*e-wallet*), platform fintech lending, sistem pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), serta integrasi layanan keuangan ke dalam ekosistem *e-commerce* telah membuka akses layanan keuangan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi pelaku UMKM. Bank Indonesia melaporkan bahwa hingga Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, dengan 93,16% diantaranya merupakan pelaku UMKM, mencatat total 6,05 miliar transaksi senilai Rp579 triliun (Bank Indonesia, 2025). Di sisi pembiayaan, OJK mencatat bahwa outstanding pembiayaan *fintech P2P lending* per November 2024 telah mencapai Rp75,60 triliun, tumbuh 27,32% secara *year-on-year*, dengan 30,91% porsi pembiayaan mengalir ke sektor produktif dan UMKM (OJK, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara inklusi keuangan digital dengan pemberdayaan UMKM. Liu et al. (2021) menemukan bahwa inklusi keuangan digital secara signifikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan bagi usaha skala kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Rahadjeng *et al* (2023) di wilayah Malang Raya membuktikan bahwa literasi keuangan, teknologi keuangan, dan inklusi keuangan secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis UMKM. Sementara itu, Tasmilah (2022) menegaskan bahwa inklusi keuangan dan transformasi digital merupakan dua instrumen yang saling menguatkan dalam upaya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Dari perspektif sistem pembayaran, Nugrah dan Poppy (2022) menunjukkan bahwa pembayaran digital berbasis *smartphone* telah menjadi media utama revitalisasi transaksi UMKM. Widyaningsih dan Widodo (2024) juga mengonfirmasi bahwa inklusi keuangan dan literasi keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Sementara Wahidiyah et al. (2025) dalam kajiannya terhadap 156 UMKM kuliner di Kabupaten Malang Selatan juga menemukan bahwa adopsi *digital payment*, literasi keuangan, dan inklusi keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM.

Penelitian-penelitian terdahulu, terbatas pada penelitian berbasis survei lapangan di satu wilayah tertentu sehingga cakupan analisisnya bersifat lokal dan belum merepresentasikan dinamika inklusi keuangan digital di tingkat nasional. Tantangan multidimensi yang dihadapi UMKM, seperti kesenjangan literasi digital, ketimpangan infrastruktur internet antarwilayah, ancaman *cyber security*, dan maraknya *illegal fintech lending*, belum dibahas secara komprehensif dalam satu kajian terpadu. Di samping itu, sebagian besar penelitian terdahulu belum memadukan kerangka teori Pemberdayaan Ekonomi Friedmann (1992) dan Transformasi Digital Westerman et al. (2014) secara sinergis sebagai pisau analisis. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan dengan mengkaji literatur secara komprehensif bagaimana ekosistem inklusi keuangan digital, yang mencakup sistem pembayaran QRIS, dompet digital, *platform fintech lending*, dan ekosistem *e-commerce* terintegrasi, berkontribusi terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia secara nasional. Atau dapat diuraikan lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji perkembangan ekosistem inklusi keuangan digital dan kontribusinya terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia; (2) mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat optimalisasi inklusi keuangan digital bagi UMKM; dan (3) merumuskan pendekatan kolaboratif antara seluruh lapisan yang terlibat dalam UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis untuk mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis fenomena inklusi keuangan digital serta dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman konteks, proses, dan makna suatu fenomena sosial-ekonomi secara komprehensif tanpa mengandalkan pengukuran statistik (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari: (1) buku teks dan referensi akademik; (2) artikel ilmiah jurnal nasional dan internasional

bereputasi; (3) laporan resmi lembaga pemerintah seperti OJK, BI, Kementerian Koperasi dan UKM, serta BPS; (4) laporan lembaga internasional seperti World Bank dan OECD; serta (5) sumber daring terpercaya seputar perkembangan *fintech*, *e-commerce*, dan digitalisasi UMKM di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui empat tahap yang mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yaitu:

1. **Identifikasi dan Seleksi Literatur.** Peneliti menginventarisasi literatur berdasarkan kesesuaian topik, keterbaruan sumber data, kredibilitas penerbit dan jurnal terindeks, laporan lembaga resmi, dan referensi akademik *peer-reviewed*.
2. **Reduksi Data.** Peneliti mengidentifikasi poin inti yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan mengeliminasi informasi yang tidak relevan.
3. **Penyajian Data.** Data yang telah direduksi disusun dalam narasi deskriptif tematik yang mencakup: konteks inklusi keuangan digital bagi UMKM, landasan teoritis, peta perkembangan ekosistem keuangan digital Indonesia, dan identifikasi tantangan.
4. **Penarikan Kesimpulan.** Peneliti melakukan sintesis data secara induktif dari temuan spesifik menuju generalisasi tentang peran inklusi keuangan digital dalam pemberdayaan UMKM. Hasil akhir berupa kesimpulan berbasis bukti dan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Untuk menjaga keabsahan kajian, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber data dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis sumber secara silang, sehingga kesimpulan tidak bertumpu pada satu sumber tunggal melainkan didukung konsistensi lintas literatur (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil kajian literatur mengenai bagaimana ekosistem inklusi keuangan digital berkontribusi terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia, mencakup tiga instrumen utama: (1) sistem pembayaran digital berbasis QRIS dan dompet elektronik, (2) *platform fintech lending*, serta (3) ekosistem *e-commerce* terintegrasi. Setiap sub-tema dianalisis dengan menghubungkan temuan empiris terkini dengan kerangka teori Pemberdayaan Ekonomi Friedmann (1992) dan Transformasi Digital Westerman et al. (2014).

1. Sistem Pembayaran Digital sebagai Instrumen Pemberdayaan

Instrumen pembayaran digital bernama *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang diluncurkan Bank Indonesia, telah mentransformasi cara UMKM melakukan dan menerima transaksi. Data Bank Indonesia menunjukkan peningkatan hingga Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta *merchant* di mana 93,16% diantaranya merupakan pelaku UMKM dengan total 6,05 miliar transaksi senilai Rp 579 triliun (Bank Indonesia, 2025).

Kehadiran dompet digital seperti GoPay, OVO, DANA, dan LinkAja memperkuat ekosistem digital dengan memberikan layanan pembayaran transaksi secara *online* sehingga prosesnya menjadi lebih praktis, cepat, dan murah, dengan media utama yang paling sering digunakan kalangan UMKM

adalah pembayaran *online* berbasis *smartphone* (Nugrah, L., & Poppy, F., 2022). Kajian dari Wahid dan Ramadhani (2023) juga menemukan bahwa penggunaan *e-wallet* semakin menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan pembayaran, mengungguli pembayaran tunai maupun transfer bank dengan lonjakan pengguna dari sekitar 10% sebelum pandemi menjadi 44% sepanjang tahun 2020 dan terus meningkat. Kaitannya dengan perspektif pemberdayaan ekonomi Friedmann (1992), akses ke sistem pembayaran digital merupakan bentuk redistribusi sumber daya kelompok usaha skala mikro. UMKM yang sebelumnya bergantung pada transaksi tunai kini memperoleh kemampuan untuk menciptakan jejak transaksi digital yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bertransaksi, mengurangi risiko pengelolaan uang tunai (*holding cash risk*), dan memperluas jangkauan pelanggan ke ranah digital.

Teori Friedmann (1992) didukung oleh penelitian Widyaningsih dan Widodo (2024) pada UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang mengkonfirmasi bahwa inklusi keuangan dan literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM. Disisi lain, kajian Wahidiyah *et al* (2025) terhadap 156 UMKM kuliner di Kabupaten Malang Selatan menunjukkan bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, dan adopsi digital *payment* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Kajian Yudianto dan Latte (2026) mengenai adopsi sistem pembayaran digital di daerah pedesaan turut memperkuat temuan Wahidiyah *et al* (2025) dengan menunjukkan bahwa QRIS, *e-wallet*, dan *mobile banking* meningkatkan efisiensi keuangan usaha mikro secara signifikan.

2. Fintech Lending sebagai Solusi Kesenjangan Akses Permodalan UMKM

Salah satu hambatan struktural yang dihadapi UMKM adalah kesenjangan akses permodalan (*financing gap*). Bank konvensional seringkali mensyaratkan agunan fisik, riwayat kredit formal, dan laporan keuangan terstandar yang sulit dipenuhi oleh mayoritas UMKM informal. *Platform fintech lending* berbasis teknologi hadir untuk menjembatani kesenjangan ini melalui pendekatan *credit scoring* alternatif yang memanfaatkan *big data* dan kecerdasan buatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat *outstanding* pembiayaan *fintech P2P lending* per November 2024 mencapai Rp 75,60 triliun atau tumbuh sebesar 27,32% *year-on-year*, dengan porsi pembiayaan ke sektor produktif dan UMKM sebesar 30,91% (OJK, 2024). Hal ini sesuai target *Roadmap Pengembangan LPBBTI 2023–2028* (OJK, 2025). Pada Februari 2025 nilai pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 26,9 triliun dengan lebih dari 14,7 juta akun penerima pinjaman, menunjukkan pertumbuhan 28,69% *year-on-year* (INDEF, 2025).

Dalam konteks teori transformasi digital Westerman *et al* (2014), *fintech lending* merupakan manifestasi nyata dari bagaimana teknologi digital mengubah mekanisme intermediasi keuangan secara fundamental. Prosedur pengajuan kredit yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam, dengan keputusan kredit berbasis analisis data perilaku digital calon peminjam. Penelitian Laia *et al.*, (2025) di Kelurahan Pasar Kecamatan

Gunungsitoli mengkonfirmasi bahwa *financial technology* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM, terutama dalam aspek perluasan akses modal dan diversifikasi produk usaha. OJK juga menetapkan target ambisius dalam *Roadmap LPBBTI* berupa peningkatan porsi pembiayaan UMKM menjadi 40%–50% dari total portofolio *fintech lending*, mencerminkan komitmen regulasi untuk memastikan teknologi keuangan berorientasi pada inklusi (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Analisis Rahmawati *et al* (2025) mengenai implementasi strategi *e-commerce* pada UMKM menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital secara optimal mampu meningkatkan daya saing UMKM secara terukur, khususnya dalam hal perluasan jangkauan pasar lintas wilayah bahkan internasional. Temuan ini sejalan dengan kerangka transformasi digital Westerman *et al* (2014) yang menegaskan bahwa keunggulan kompetitif era digital tidak cukup hanya dengan mengadopsi teknologi melainkan harus disertai perubahan menyeluruh dalam model bisnis dan kapabilitas organisasi. Program “UMKM *Level Up*” yang diluncurkan pemerintah pada 2024 bertujuan mempercepat adopsi platform digital oleh UMKM sekaligus meningkatkan kapabilitas manajerial pelaku usaha dalam mengelola ekosistem digital yang semakin kompleks (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024).

3. Akses Platform E-Commerce yang Terintegrasi dan Ekosistem Keuangan Embedded

Platform *e-commerce* seperti Tokopedia dan Shopee telah berevolusi dari saluran pemasaran digital menjadi ekosistem ekonomi terpadu yang mengintegrasikan layanan keuangan langsung ke dalam aktivitas bisnis sehari-hari UMKM. Fitur *embedded finance* seperti “SPayLater” di Shopee memungkinkan UMKM mengakses modal kerja, layanan asuransi, dan manajemen inventori dalam satu *platform* tanpa berurusan dengan lembaga keuangan terpisah (Wahyuningsih *et al.*, 2024).

TANTANGAN INKLUSI KEUANGAN DIGITAL

Pemerintah mendukung transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan UMKM melalui program yang bernama “UMKM Go Digital” dan program “Bangga Buatan Indonesia”. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam *websitenya*, Program UMKM Go Digital menetapkan target 30 juta UMKM dapat terdigitalisasi pada 2024 (Kemenkop dan UKM, 2021). Namun sampai dengan pertengahan 2024 program ini baru terealisasi sekitar 25 juta UMKM (Ayudiana, 2024). Realitanya, perjalanan menuju inklusi keuangan digital yang menyeluruh dan merata di Indonesia melewati sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Tantangan-tantangan ini bersifat multidimensi mencakup aspek infrastruktur, sumber daya manusia, hingga regulasi sebagaimana diuraikan berikut:

1. Kesenjangan Literasi dan Kemampuan Digital

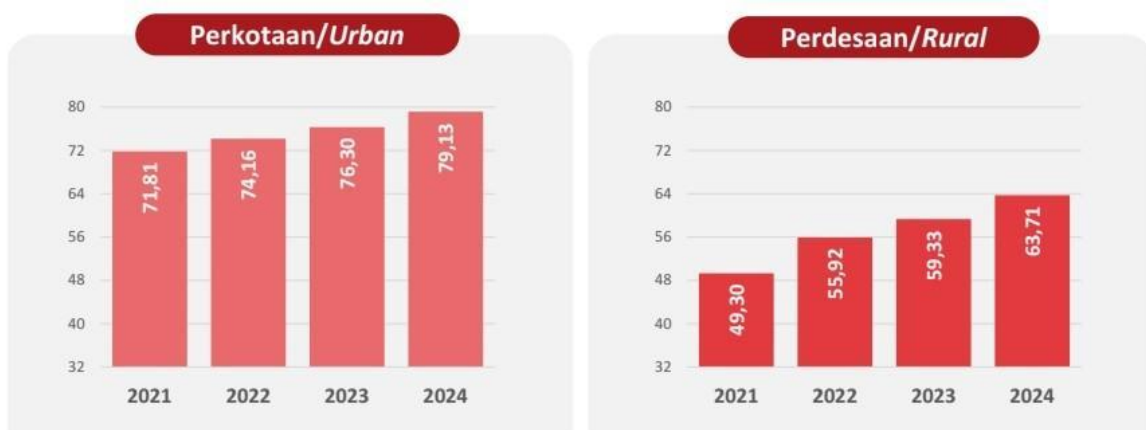
Kesenjangan literasi dan kemampuan digital di kalangan pelaku UMKM masih menjadi hambatan utama. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh

Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2022 baru mencapai 49,68%, sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 85,10%, yang artinya masih terdapat kesenjangan signifikan antara pemahaman dan penggunaan layanan keuangan. Kondisi ini semakin diperparah di kalangan pelaku UMKM di daerah pedesaan, di mana tingkat literasi digital masih jauh di bawah rata-rata nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

2. Ketimpangan Infrastruktur Digital

Ketimpangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi persoalan. Berikut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021-2024:

Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Urban dan Rural yang dapat Mengakses Internet Periode 2021-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Data menunjukkan bahwa penduduk yang dapat mengakses internet di wilayah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Pada tahun 2021, selisih antara keduanya tergolong besar yaitu sekitar 22,51%. Namun seiring berjalannya waktu, selisih tersebut mulai mengecil hingga pada tahun 2024 menjadi sekitar 15,42%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan masih ada namun jaraknya semakin berkurang. Di sisi lain, pertumbuhan di wilayah pedesaan terlihat lebih cepat dibandingkan perkotaan. Selama rentang periode 2021-2024 wilayah perkotaan mengalami kenaikan sekitar 7,32%, sedangkan wilayah pedesaan meningkat jauh lebih besar yaitu sekitar 14,41%. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah pedesaan mengalami perkembangan yang lebih pesat dan secara bertahap mulai mengejar ketertinggalannya dari wilayah perkotaan.

Grafik Perbandingan Persentase Penduduk yang dapat Mengakses Internet menurut Provinsi Periode 2021-2024



Sumber : Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tinjauan persebaran akses internet berdasarkan provinsi selama tahun 2021 hingga 2024 terlihat cukup merata meskipun tingkat pencapaiannya beragam. Persentase tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 81,30% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi sebesar 89,26% pada tahun 2024. Sementara itu, persentase terendah dicapai oleh Provinsi Papua Pegunungan yang mencapai sebesar 6,76% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun secara nasional terjadi peningkatan, kesenjangan digital antarwilayah masih memerlukan adanya perhatian serius.

3. Ancaman *Cyber Security*

Kementerian Komunikasi dan Digital melaporkan bahwa dalam 2020-2025 jumlah konten *deepfake* di Indonesia meningkat sebesar 550%. Teknologi ini digunakan untuk memalsukan identitas dalam proses verifikasi wajah via digital, terutama pada sektor perbankan dan *financial technology (fintech)* (Verihubs, 2026). Penyebab Tingginya Angka *Cybercrime* salah satunya adalah penetrasi internet yang tinggi sebagaimana data pendukung dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dikutip dari Verihubs (2026) menunjukkan adanya 3,64 miliar serangan siber di Indonesia selama periode Januari hingga Juli 2025 dengan mayoritas serangan berupa *malware* sebanyak 83,68% dan sektor keuangan menjadi target utama karena nilai ekonomisnya yang tinggi (Verihubs, 2026). Meningkatnya serangan siber ini menimbulkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi khususnya pada transaksi UMKM, yang pada akhirnya juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Kondisi ini mengindikasikan urgensi penguatan regulasi dan standar keamanan digital yang adaptif, khususnya dalam sistem verifikasi identitas dan perlindungan data guna menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam ekosistem keuangan digital.

4. *Illegal Fintech Lending*

Pertumbuhan *fintech lending* juga diiringi oleh tantangan serius berupa proliferasi pinjaman *online* ilegal. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan secara aktif melakukan penindakan, keberadaan entitas ilegal terus menjadi ancaman bagi UMKM yang membutuhkan modal cepat namun memiliki literasi keuangan terbatas. Regulasi terbaru melalui OJK *Regulation* No. 3 of 2024 tentang implementasi inovasi teknologi sektor keuangan dan OJK *Regulation* No. 29 of 2024 tentang *Alternative Credit Scoring* diharapkan dapat memperkuat ekosistem pembiayaan digital yang terpercaya (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa hingga Oktober 2023, terdapat 1.445 entitas pinjaman *online* ilegal yang telah ditutup sejak tahun 2018, namun keberadaannya terus bermunculan dan menjerat banyak pelaku UMKM dengan bunga tinggi (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

5. *Regulasi yang Adaptif*

Regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi juga menjadi penghalang. World Bank (2022) menekankan bahwa negara-negara berkembang termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara inovasi layanan keuangan digital dan perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan karena regulasi negara yang seringkali tertinggal dari laju perkembangan teknologi (*regulatory lag*) (World Bank, 2022). *Regulatory lag* dapat menciptakan ketidakpastian hukum. UMKM cenderung ragu menggunakan platform digital jika ada risiko perubahan kebijakan mendadak atau belum adanya perlindungan hukum yang jelas. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan UMKM dan konsumen, sementara kepercayaan penting dalam membangun inklusi keuangan digital. Regulasi nasional yang tidak kompatibel dengan standar internasional berisiko mengalami isolasi regulatif yang berpotensi menghambat investasi asing dan mengurangi kepercayaan global (Widjaja, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji peran inklusi keuangan digital dalam mendorong pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui tiga instrumen utama: sistem pembayaran digital (QRIS dan dompet elektronik), *platform fintech lending*, serta ekosistem *e-commerce* terintegrasi dengan layanan keuangan *embedded*. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekosistem inklusi keuangan digital telah memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan UMKM. QRIS yang telah menjangkau 39,3 juta *merchant* dengan 93,16% diantaranya pelaku UMKM membuktikan bahwa sistem pembayaran digital berhasil meredistribusi akses sumber daya keuangan kepada usaha mikro sebagaimana dicetuskan dalam teori Pemberdayaan Ekonomi Friedmann (1992). Dompet digital turut memperluas jangkauan transaksi UMKM sehingga mengurangi risiko pengelolaan uang tunai, dan menciptakan jejak transaksi yang mudah bagi akses pembiayaan ke depan.

Platform fintech lending menjadi salah satu solusi atas kesenjangan permodalan UMKM yang selama ini terhambat persyaratan ketat perbankan konvensional. Dengan pendekatan *credit scoring* berbasis *big data*, *outstanding* pembiayaan *fintech P2P lending* telah mencapai Rp75,60 triliun per November 2024 dengan porsi 30,91% mengalir ke sektor produktif dan UMKM. Hal ini mencerminkan transformasi fundamental dalam mekanisme intermediasi keuangan sebagaimana dijelaskan oleh teori Transformasi Digital Westerman et al. (2014). Integrasi layanan keuangan ke dalam ekosistem *e-commerce* juga memperluas akses UMKM terhadap modal kerja, manajemen inventori, dan pasar dalam satu platform terpadu. Meskipun demikian, optimalisasi inklusi keuangan digital masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan literasi digital di kalangan UMKM khususnya di pedesaan, adanya ketimpangan infrastruktur internet antar wilayah, ancaman *cyber security* yang masif pada sektor keuangan yang masih sebagai target utama, proliferasi *fintech lending* ilegal yang terus menjerat pelaku UMKM berliterasi rendah, serta ketertinggalan regulasi (*regulatory lag*) dalam mengimbangi laju inovasi teknologi.

Berdasarkan temuan ini peneliti merekomendasikan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, industri keuangan, akademisi, dan LSM sebagai strategi utama. Sinergi ini diperlukan untuk memperluas program literasi digital, mempercepat pemerataan infrastruktur internet, memperkuat perlindungan konsumen digital, serta memastikan regulasi yang adaptif dan responsif. Dengan pendekatan kolaboratif yang terstruktur, manfaat inklusi keuangan digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan UMKM di Indonesia sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayudiana, S. (2024, Oktober 14). Kemenkop UKM: 25,5 juta UMKM telah "go digital". ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4397157/kemenkop-ukm-255-juta-umkm-telah-go-digital>
- Bank Indonesia. (2025). QRIS Jelajah Indonesia 2025: Perkembangan QRIS Semester I 2025. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2717025.aspx
- Bank Indonesia. (2025). Ekonomi dan Keuangan Digital : Konsep dan Implementasi di Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/publikasi/Documents/Ekonomi-dan-Kuangan-Digital-Konsep-dan-Implementasi-di-Indonesia.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik telekomunikasi Indonesia 2024. BPS. <https://www.bps.go.id/en/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html>
- Costa, A., & Castro, R. (2021). Justification for the adoption of the digital transformation as a process in SMEs: A systematic literature review. *Business Systems Research Journal*, 12(2), 72–84. <https://doi.org/10.2478/bsrj-2021-0026>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Corvello, V., Verteramo, S., Straffalaci, M., & Ammirato, S. (2023). Exploring digital transformation strategy to achieve SMEs resilience and antifragility: A systematic literature review. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 37(3), 1–28. <https://doi.org/10.1080/08276331.2024.2392080>
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell Publishers.
- INDEF. (2025). *Dinamika P2P Lending di Indonesia: Peluang dan Tantangan Kebijakan*. INDEF Policy Brief No. 1/2025. <https://indef.or.id>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). *Program UMKM Level Up: Meningkatkan Kapabilitas Digital Pelaku UMKM*. <https://kemenkopukm.go.id>
- Laia, D., Hulu, P. F., Zebua, S., & Duha, T. (2025). Pengaruh Financial Technology Terhadap Perkembangan UMKM di Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 5868–5893. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2712>
- Liu, Y., Luan, L., Wu, W., Zhang, Z., & Hao, Y. (2021). Can digital financial inclusion promote China's economic growth? *International Review of Financial Analysis*, 78, 101889. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101889>
- Matalamäki, M. J., & Joensuu-Salo, S. (2022). Digitalization and strategic flexibility: A recipe for business growth. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 29(5), 692–714.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugrah, L., & Poppy, F. (2022). Peran sistem pembayaran digital dalam revitalisasi UMKM. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(3), 20–32. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik fintech lending OJK Oktober 2023*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, Desember). *Siaran pers: Pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan untuk sektor jasa keuangan yang stabil dan berdaya tahan (Rapat Dewan Komisiner Bulanan Desember 2024)*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Desember-2024.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023–2028*. <https://www.ojk.go.id>
- Purnamaningrum, Tri K. dkk. (2025). *Teknologi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit Buku Sonpedia : Jambi.
- Rahmawati, N., Almunata, E., Aisah, N., & Hidayati, F. (2025). Analisis implementasi strategi e-commerce dalam meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Jurnal Tren Bisnis Global*, 5(2). <https://doi.org/10.38101/jtbg.v5i2.15915>
- Rahadjeng, E. R., Fitriyah, & Sari, N. T. P. (2023). The impact of financial literacy, financial technology, and financial inclusion on SME business performance in Malang Raya, Indonesia. *Asian Journal of Management and Entrepreneurship Social Science*, 2(1), 275–288.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tasmilah. (2022). *Inklusi keuangan dan transformasi digital: Upaya mendorong peningkatan pendapatan UMKM*. Bank Indonesia.
- Verihubs. (2026, 22 Maret). *Statistik Cybercrime Indonesia 2025-2026: Data dan Tren Terbaru*. <https://verihubs.com/blog/statistik-cybercrime-indonesia>
- Wahidiyah, M., Asna, A., & Mustikowati, R. (2025). Analisis Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Digital Payment terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kuliner Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(3), 538–556. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6209>
- Wahid, A., & Ramadhani, S. E. (2023). Peran dompet digital dalam meningkatkan kualitas keuangan UMKM menuju era Society 5.0. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).

- Widyaningsih, E. N., & Widodo, H. (2024). Meningkatkan Kinerja UMKM: Dampak dari Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, 1(2), 17. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i2.256>
- Widjaja, Gunawan. (2025). Tantangan Harmonisasi Regulasi Digital Di Indonesia: Perbedaan Kerangka Hukum Nasional Dan Internasional Serta Keterbatasan Sumber Daya Dalam Akselerasi Sinkronisasi. *Jurnal Netizen: Journal Of Society And Bussiness*, 1 (11), 588-599.
- Wahyuningsih, R., Shanti, N., & Hanifah, R. (2024). Peran kontributif entrepreneurship ecosystem dan embedded finance terhadap transformasi bisnis digital UMKM Kota Malang. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 8(4), 983–994. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmbk/article/view/29493>
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Review Press.
- World Bank. (2022). *The global findex database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank Group.
- Yudianto, A., & Latte, J. (2026). Adoption of Digital Payment Systems and Its Effect on Financial Efficiency of Micro Enterprises in Rural Areas. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Kebijakan*, 14(1), 460–475. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v14i1.4605>